

JURNAL POLITIQUE

Jurnal Prodi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Ampel Surabaya

Vol. 2 No. 1 Januari 2022

**Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri
Pendidikan Anti Korupsi
(Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan)**

Syalsabila Fauziyyah Fariska

(Program Studi Ilmu Politik, FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan observasi non-partisipatif, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam tiga mata pelajaran, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya, faktor pendukung implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua instansi terkait, partisipasi siswa yang aktif, peraturan atau pedoman yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik, ada bimbingan teknis untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, pelaksanaannya sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antara satu guru dengan guru lainnya. Kemudian, terkait faktor penghambat dalam implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan yaitu kurangnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang baik, lingkungan sosial yang buruk sehingga membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan menyelaraskan materi anti korupsi dengan materi pelajaran yang diajarkan, pemberitaan di media yang bertentangan dengan yang disampaikan oleh guru.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Inseri, Pendidikan Anti Korupsi.

Pendahuluan

Kasus terjadinya korupsi dari hari ke hari kian marak. Hampir setiap hari berita tentang korupsi muncul di berbagai media. Bahkan, korupsi dianggap biasa sehingga masyarakat sulit membedakan mana perbuatan korupsi dan mana perbuatan yang tidak korupsi. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi anti korupsi lainnya, faktanya Indonesia menduduki rangking teratas sebagai negara terkorup nomor 80 di dunia, serta di tingkat nasional Jawa Timur menjadi provinsi terkorup ketiga di Indonesia.¹

Contoh kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur yakni korupsi yang dilakukan oleh Bendahara KPU Kabupaten Lamongan, terkait korupsi Dana Hibah Pilkada 2015 sebesar Rp 1 Miliar, serta korupsi yang dilakukan oleh salah satu pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar Rp 1,5 Miliar.² Serta korupsi kelas kakap yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang tahun 2019 yang mampu mengalahkan korupsi massal di Sumatera Utara yang melibatkan 38 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019.³ Dan berbagai kasus korupsi yang melibatkan 330 kepala daerah atau sekitar 86,22% dari jumlah kepala daerah di Indonesia.⁴

Banyaknya kasus korupsi ini dapat dianalisa bahwa mental orang Indonesia dalam memerangi korupsi masih belum kuat. Godaan untuk tidak melakukan dan menolak korupsi semakin susah untuk dilakukan. Untuk mewujudkan *good goverment*, maka perlu diadakannya pendidikan anti korupsi yang mulai diajarkan sejak dini. Tujuan pendidikan anti korupsi ini untuk menanamkan pada diri seseorang bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak orang dan negara.

Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:

1. Pembenahan informasi untuk pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya.
2. Pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi.

¹<https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-indonesia.html/amp> diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 19.00 WIB.

²<https://faktualnews.co/2019/09/27/kredit-fiktif-bri-lamongan-senilai-rp-1-565-m-mantan-pj-kepala-bri-mantup-diadili/166654/> diakses pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.03 WIB.

³<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4365158/gonjang-ganjing-korupsi-massal-41-anggota-dprd-kota-malang> diakses pada tanggal 19 November 2019 pukul 18.00 WIB

⁴<https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi/full&view=ok> diakses pada tanggal 2 November 2020.

3. Pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.⁵

Upaya pemberantasan korupsi haruslah dipersiapkan secara sistematis dan memiliki tolak ukur yang jelas. Kejelasan program pemberantasan korupsi akan membuat program tersebut dapat diteruskan pada generasi selanjutnya. Salah satu langkah yang paling tepat dan efektif adalah mencegah perbuatan korupsi. Strategi untuk mencegah korupsi yang paling mendasar ialah melalui jalur pendidikan yang dimulai sejak usia dini. Pendidikan formal merupakan salah satu upaya strategis dalam pencegahan dan antisipasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa melalui pendidikan.⁶

Ada sembilan nilai yang akan diinsersikan dalam pendidikan anti korupsi, yaitu: jujur; peduli; mandiri; disiplin; tanggungjawab; kerja keras; sederhana; berani; serta adil.⁷ Pendidikan anti korupsi sebagai program untuk membentuk mental anti korupsi, sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Kesamaan tujuan ini dapat dikolaborasikan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral. Pendidikan anti korupsi diinsersi (dimasukkan) dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, namun tidak menambah mata pelajaran baru melainkan diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada.

Dengan segala pertimbangan tersebut, maka Menteri Pendidikan menganjurkan penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah seluruh Indonesia. Ada tiga wilayah yang langsung sigap dan cepat mengeluarkan peraturan daerahnya mengenai pendidikan anti korupsi. Diantaranya adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Jawa Tengah, Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Lamongan sebagai tempat yang akan diteliti. Pemilihan lokasi ini berdasarkan berita di beberapa media bahwa indeks pencegahan

⁵Dharma Kesuma dkk. 2009. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press. Halaman 59

⁶Nuriani Laura dkk. 2014. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus*. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, 93-102, halaman 94

⁷ Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 45

korupsi di Pemerintah Kabupaten Lamongan terbaik di Indonesia versi KPK.⁸ Peraturan Bupati mengenai implementasi insersi pendidikan anti korupsi diresmikan pada bulan Mei 2019 yang kemudian dilaksanakan pada tahun ajaran 2019/2020. Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi (Studi Kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan).”

Landasan Teori

Secara luas implementasi kebijakan diartikan sebagai tahapan dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang, yaitu proses melaksanakan undang-undang yang dimana seluruh pelaksana bekerjasama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai yang telah dirumuskan.⁹

*“Policy implementation is a process of interaction between the setting of goals and actions geared to achieve them. (Implementasi kebijakan adalah suatu proses hubungan yang terjadi antara penetapan tujuan dan tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapainya).”*¹⁰

Implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah proses melaksanakan atau mewujudkan suatu keputusan negara (pemerintah) yang otoritatif. Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah segala sesuatu yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan yang memberikan program, kebijakan, keuntungan atau capaian yang nyata.¹¹ Menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dipraktekkan di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan *output* dan *outcome* seperti yang telah direncanakan. Output dapat dilihat dalam waktu yang singkat setelah proses implementasi kebijakan. *Outcome* biasanya diukur setelah keluarnya *output* atau dalam waktu yang lama setelah proses implementasi kebijakan telah dilaksanakan.¹²

Berdasarkan pemikiran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak hanya fokus pada perilaku dari lembaga atau instansi pelaksana yang bertanggungjawab atas suatu program, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai

⁸<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/191925/versi-kpk-indeks-pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-terbaik> diakses pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 07.35 WIB.

⁹Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, halaman 147

¹⁰Muh. Irfan Islamy. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, halaman 72

¹¹Budi Winarno, Ibid, halaman 149

¹²Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media, halaman 143

jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program, dan yang pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan terhadap program tersebut.

Pemikiran Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan dikenal dengan istilah *A Model of the Policy Implementation*. Teori ini berawal dari argumen bahwa dalam proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, karena pada setiap kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian Van Meter dan Van Horn mengemukakan suatu pendekatan yang menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja. Konsep penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak.¹³

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan data tersebut bersumber dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjabarkan kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta berusaha menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan

Kebijakan mengenai inseri pendidikan anti korupsi merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Lamongan dengan disahkannya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Lamongan. Implementasi inseri pendidikan anti korupsi merupakan penerapan pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

¹³Solichin Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, halaman 164

¹⁴Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, halaman 68

Peraturan Bupati tersebut dikeluarkan pada bulan Mei 2019, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan disahkannya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru yang diselenggarakan pada bulan Juli 2019.

Bentuk penerapan implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah melalui penyisipan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi tersebut adalah tanggungjawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli. Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa implementasi pada program-program publik secara umum akan berhasil ketika perubahan yang dikehendaki relatif sedikit. Sementara komitmen terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Terdapat beberapa variabel yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn:

Pertama, standar dan sasaran kebijakan yaitu kebijakan mengenai insersi pendidikan anti korupsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi, yang bertujuan untuk menanamkan pada diri anak bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak benar dan merugikan banyak orang dan negara. Nilai-nilai pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Pendidikan anti korupsi sebagai wadah untuk membentuk mental atau karakter anti korupsi, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yaitu membentuk warga negara yang berkarakter. Kesenambungan tujuan ini dapat dipadukan dalam proses pembelajaran di sekolah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan moral.

Kedua, sumber daya yang dalam hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), metode dan media yang digunakan serta sarana dan prasarana sekolah. Mengenai sumber daya manusia (SDM) yang meliputi guru, tidak ada kendala yang signifikan karena semua guru mendukung program insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan, dan adanya workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, sehingga guru sudah memahami program ini. Metode dan media yang digunakan juga menarik seperti gambar, film, dan permainan. Kemudian sarana dan prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Lamongan juga

sudah sangat baik dan menunjang implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

Ketiga, karakteristik badan atau instansi pelaksana dalam insersi pendidikan anti korupsi ini adalah Bupati (Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan) sebagai penyusun kebijakan yang juga ikut mengevaluasi, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai pencetus desain, pelaksana serta mengevaluasi sekolah yang menyelenggarakan insersi tersebut, serta terdapat pengawas sekolah yang membantu proses evaluasi, dan pelaksana utama kebijakan insersi adalah kepala sekolah serta guru mata pelajaran.

Keempat, komunikasi antar organisasi pelaksana telah dilaksanakan dengan baik dalam proses implementasi insersi anti korupsi. Badan atau instansi pelaksana seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, Kepala Sekolah, dan Guru memiliki komunikasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Kelima, sikap para pelaksana dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi sangat mendukung. Namun, dalam implementasi di kelas terkadang masih ada kurangnya perhatian dari beberapa siswa. Kurangnya minat siswa disampaikan oleh guru sebagai pelaksana kebijakan yang berhadapan langsung dengan siswa.

Keenam, lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan cukup mendukung. Kepala sekolah dan guru aktif dalam kegiatan implementasi insersi pendidikan anti korupsi dan para siswa memberikan respon yang baik. Namun, apabila siswa memiliki pergaulan atau lingkungan luar yang kurang baik, maka nilai-nilai anti korupsi akan sulit tertanam dalam diri siswa.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan

Faktor pendukung dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi adalah adanya usaha untuk mendukung, mengajak, dan mengikuti semua kegiatan insersi pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lamongan. Adanya faktor pendukung ini dapat diketahui melalui wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Faktor pendukung pertama adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dimana sekolah memiliki upaya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, adanya hubungan kerja yang baik antara staf sekolah dengan saling menghormati, mendukung dan siap berkolaborasi untuk kemajuan sekolah dan siswa, adanya partisipasi aktif dari siswa dan orang tua, serta guru mampu

memberikan contoh sikap yang baik dan penggunaan media dan metode pembelajaran yang menarik.

Kemudian, semua guru sudah menyampaikan materi dengan seragam. Artinya semua guru sudah memahami materi yang sama, tidak ada perbedaan materi yang disampaikan oleh satu guru dengan guru lainnya. Dan adanya respon yang baik dari siswa dengan disampaikannya materi berupa insersi atau penyisipan pendidikan anti korupsi, sehingga siswa tidak mengalami perbedaan yang signifikan dalam proses belajar di kelas. Dan sumber daya manusia (SDM) yang utama yaitu guru tidak terdapat kendala yang berarti. Dari sini dapat disimpulkan bahwa semua guru menerima peraturan bupati tentang insersi pendidikan anti korupsi dan mendukung sepenuhnya dengan memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswanya. Hal ini juga dikarenakan adanya workshop berjenjang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1

Hasil Wawancara tentang Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

No.	Faktor Pendukung Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.
1.	Sarana dan prasarana sekolah yang memadai.
2.	Komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat.
3.	Partisipasi aktif siswa.
4.	Regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang jelas.
5.	Media dan metode pembelajaran yang menarik.
6.	Adanya workshop berjenjang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah.
7.	Penerapan sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antar satu guru dengan guru yang lain.

Faktor penghambat adalah faktor yang sifatnya menghambat jalannya suatu kegiatan dan bersifat seperti menggagalkan sesuatu. Dalam kegiatan insersi ini tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar. Apalagi Peraturan Bupati ini baru dikeluarkan pada tahun 2019. Masih banyak yang perlu dipelajari untuk menyempurkan peraturan tentang insersi pendidikan anti

korupsi. Berikut ini adalah beberapa kendala dalam penerapan insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan:

1. Kurangnya minat siswa. Ada banyak kemungkinan yang mendasari kurang berminatnya siswa dalam mempelajari materi anti korupsi. Misalnya, karena siswa merasa bosan dengan materi yang disampaikan, atau karena memang adanya perubahan psikis remaja yang mengalami pubertas sehingga terkadang terkesan membandel.
2. Latar belakang dan kondisi keluarga yang kurang mendukung dan lingkungan sosial atau pergaulan yang kurang baik. Kedua faktor tersebut dapat dikatakan menjadi faktor eksternal penghambat implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Apabila di sekolah sudah disisipkan nilai pendidikan anti korupsi namun di lingkungan keluarga tidak ditanamkan nilai yang sama, maka implementasinya akan kurang maksimal. Namun, apabila di sekolah dan di keluarga sama-sama ditanamkan nilai anti korupsi, tetapi siswa terpengaruh oleh lingkungan sosial maka itu menjadi salah satu faktor penghalang penerapan nilai-nilai anti korupsi oleh siswa. Dan efek dari kejadian ini mengakibatkan guru membutuhkan waktu tambahan untuk mempelajari, menyiapkan, dan mengajarkan materi nilai anti korupsi kepada siswa.
3. Minat atau sikap warga sekolah, khususnya siswa yang masih belum menerapkan nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan pada diri sendiri tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada niat keinginan pribadi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, dan para guru berusaha mengimplementasikan nilai anti korupsi di aktivitas belajar mengajar di sekolah supaya tertanam di *mindset* para siswa.
4. Adanya pemberitaan di media massa mengenai kasus korupsi yang kontradiktif dengan apa yang diajarkan di sekolah. Yang ditakutkan apabila siswa menjadi salah paham tentang maraknya kasus korupsi di Indonesia. Ada kemungkinan siswa menganggap melakukan korupsi adalah hal biasa dan akan menguntungkan, apalagi hukumannya hanya di penjara. Oleh karena itu, perlu dilakukan insersi pendidikan anti korupsi.

Tabel 1.2

Hasil Wawancara tentang Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.

No.	Faktor Penghambat Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan.
1.	Minimnya kesadaran siswa.

2.	Latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang mendukung.
3.	Lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang baik.
4.	Membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan mensinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang diampu.
5.	Adanya pemberitaan di media yang kontradiktif dengan yang disampaikan oleh guru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan terkait Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Inseri Pendidikan Anti Korupsi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lamongan sebagai berikut:

1. Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan bisa dikatakan sudah memenuhi standar ideal implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Dari enam variabel atau indikator implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan sudah memenuhi 6 kriteria tersebut.
2. Faktor pendukung implementasi inseri pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan dipengaruhi oleh faktor internal mulai dari regulasi dan pedoman yang jelas, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan adanya SDM yang mendukung dari guru.
3. Faktor penghambat sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, mulai dari lingkungan pergaulan siswa yang tidak baik, dan berita di media yang kontradiktif dengan yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat dipertimbangkan untuk perkembangan implementasi inseri pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan, khususnya di SMP Negeri 1 Lamongan:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, perlu adanya indikator penilaian yang jelas terhadap implementasi inseri pendidikan anti korupsi yang jelas agar mempermudah proses pengawasan dan evaluasi.
2. Perlu diadakannya evaluasi lanjutan oleh Pemerintah Daerah mengenai implementasi inseri pendidikan anti korupsi di Kabupaten Lamongan.

3. Bagi SMP Negeri 1 Lamongan perlu diadakannya kegiatan yang melatih kesadaran para siswa tentang nilai-nilai anti korupsi, terutama dalam hal melawan dan mencegah tindak pidana korupsi.
4. Bagi orangtua dan wali murid, sebaiknya dampingi anak di lingkungan keluarga dengan baik agar proses implementasi insersi pendidikan anti korupsi tidak berhenti di sekolah saja, namun bisa dilanjutkan di lingkungan keluarga.

Daftar Pustaka

- Agus Wibowo. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Burhan Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dharma Kesuma dkk. 2009. *Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Pustaka Aulia Press.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media.
- Juwono Sudarsono. 2008. *Pendidikan, Kemanusiaan, dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Kompas: Jakarta.
- Muh. Irfan Islamy. 2014. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Prof.Dr. Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab. 2017. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta :MedPress.

Sumber Jurnal:

- Andika Fitriyanto. 2017. *Implementasi Metode Insersi Pada Mata Pelajaran Geografi dalam Penanaman Nilai-Nilai Islam di MA Manzilul Ulum Kabupaten Kudus*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Fira Mubayyinah. 2017. *Semai: Sembilan Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Anak Usia Dini*. Jurnal Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education Vol.1.

Nuriani Laura dkk. 2014. *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus*. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran Vol. 2, No. 1, 93-102.

Sumber Internet:

<https://faktualnews.co/2019/09/27/kredit-fiktif-bri-lamongan-senilai-rp-1-565-m-mantan-pj-kepala-bri-mantup-diadili/166654/> diakses pada 17 Desember 2020 pukul 21.03 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/595388/menteri-gamawan-86-persen-kepala-daerah-korupsi/full&view=ok> diakses pada 2 November 2020

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4365158/gonjang-ganjing-korupsi-massal-41-anggota-dprd-kota-malang> diakses pada 19 November 2019 pukul 18.00 WIB

<https://www.google.com/amp/s/hargo.co.id/berita/yaman-negara-terkorup-di-dunia-jatim-di-indonesia.html/amp> diakses pada 2 Januari 2020 pukul 19.00 WIB

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/191925/versi-kpk-indeks-pencegahan-korupsi-pemkab-lamongan-terbaik> diakses pada 18 Desember 2020 Pukul 07.35 WIB